

Dinas PUPR Kab. Bogor Black List Empat Kontraktor

CIBINONG (IM)- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas PUPR Kabupaten Bogor setidaknya memasukkan empat penyedia jasa atau kontraktor ke daftar hitam atau black list.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Iwan Irawan mengatakan, tindakan tegas itu dilakukan karena kontraktor tersebut tidak bisa menuntaskan pekerjaannya, dan progres pekerjaannya di bawah 60 persen.

"Saat ini sudah empat penyedia jasa (kontraktor) yang sudah kami (Dinas PUPR Kabupaten Bogor) black list karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, jumlahnya bisa saja bertambah," kata Iwan Irawan kepada wartawan, Selasa kemarin.

Iwan menuturkan, sejauh ini ada 50 proyek peningkatan atau pembangunan saluran irigasi yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya hingga akhir Desember 2023. "Sebagian besar penyedia jasa yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut, kami berikan addendum atau

waktu tambahan disertai sanksi denda 0,01 persen per harinya," tutur Iwan Irawan.

Sedangkan, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Edi Mulyadi menerangkan sejauh ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek-proyek yang meluncur ke awal Tahun 2024 terus melakukan evaluasi. "Hasil evaluasi kami, penyedia jasa yang ditunjuk karena kekurangan finansial atau modal. Hal ini bakal menjadi pembelajaran dalam proses lelang proyek infrastruktur di tahun 2024 ini," terang Edi.

Ia menjelaskan bahwa proyek peningkatan jalan dan irigasi yang mangkrak dan penyedia jasanya di-black list. Itu ada di wilayah barat, selatan dan timur Kabupaten Bogor. "Salah satunya penyedia jasa yang kena black list itu yang mengerjakan peningkatan jalan di Kecamatan Sukamakmur, dan Desa Pancawati, Caringin," jelasnya. ● **gio**

Pemkab Situbondo akan Buka Rekrutmen PPPK dan CPNS

SITUBONDO (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2024 ini. Drencanakan rekrutmen untuk tiga formasi, yaitu guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Bupati Situbondo, Kama Suswandi mengatakan, rekrutmen PPPK dan CPNS akan kembali dilakukan seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Pada 2023, Pemkab Situbondo meniadakan rekrutmen CPNS atau PPPK karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Sesuai dengan janji saya, jika pendapatan asli daerah terus meningkat, akan melakukan rekrutmen kembali. Karena tahun ini PAD ada kenaikan sekitar Rp 100 miliar, dari tahun sebelumnya Rp 52 miliar, maka kami penuhi untuk rekrutmen

PPPK dan CPNS," kata Bupati, Rabu (31/1).

Bupati menjelaskan, Pemkab merencanakan rekrutmen PPPK untuk formasi guru sebanyak 321 orang. "PPPK formasi guru adalah prioritas utama bagi guru yang sudah lolos nilai ambang batas atau passing grade sebelumnya," ujar dia.

Selain formasi guru, menurut Bupati, rencananya ada rekrutmen untuk formasi tenaga kesehatan sebanyak 50 orang dan tenaga teknis 75 orang. Adapun rekrutmen CPNS 25 orang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo disebut sudah mengirimkan dokumen usulan rekrutmen PPPK dan CPNS 2024 itu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB). Pemkab Situbondo akan menunggu hasil verifikasi usulan tersebut dari Kempan RB. ● **pra**

IDN/ANTARA



KAMBING PERAH SUPLAI KEBUTUHAN SUSU NASIONAL

Medik Veeriner dari Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi memeriksa kesehatan kambing perah di sentra peternakan Tlemung Kalipuro, Banyuwangi, Jatim, Rabu (31/1). Pemda setempat berupaya meningkatkan peternakan kambing perah, selain menjadi peluang bisnis pada sektor peternakan juga menjadi salah satu solusi mencukupi kebutuhan susu nasional sebanyak 4,4 juta ton.

Satpol PP Kota Bogor Masih Petakan PKL di Trotoar Jalan Merdeka Bogor

BOGOR (IM)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor masih melakukan pemetaan area trotoar Jalan Merdeka, Bogor Tengah, Kota Bogor, yang ditempati para pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan.

Kepala Seksi Operasional (Kasi Ops) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Surya Darma menuturkan, pemetaan dilakukan untuk menertibkan PKL di lokasi tersebut. "Untuk lokasi tersebut sedang kita lakukan pemetaan untuk dilakukan penertiban di lokasi tersebut," ucap Surya, Rabu (31/1).

Surya melanjutkan, kawasan trotoar Jalan Merdeka sudah tercatat dalam agenda penertiban

Satpol PP Kota Bogor pada 2024, atau setelah revitalisasi tuntas dikerjakan 2023 lalu. Pasalnya, para PKL yang akan ditertibkan sudah berjalan di atas trotoar Jalan Merdeka selama bertahun-tahun. "Karena kita (Satpol PP) menertibkan pedagang yang sudah bertahun-tahun menempati lokasi tersebut," ucap Surya.

Surya mengungkapkan, sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor, PKL tidak diperbolehkan berjualan di area trotoar. "Secara aturan yang ada di Kota Bogor tidak boleh. Kondisi sekarang jauh lebih baik karena pedestriannya sudah jadi, mangkannya jadi agenda kami tahun ini," tutur Surya. ● **jai**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PAMERAN INOVASI MAHASISWA UNISBA

Mahasiswa mengamati alat pencacah keramik dan kaca pada pameran inovasi mahasiswa di Kampus Unisba, Bandung, Jabar, Rabu (31/1). Kampus Unisba menggelar pameran inovasi dari mahasiswa berbagai fakultas guna membangun konektivitas antara perguruan tinggi dengan masyarakat dalam bentuk produk inovasi, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Asmawa Tosepu Minta Dishub Ikut Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Seluruh jajaran Dishub dan juga Pemkab Bogor diminta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan menggunakan hak suaranya dalam ajang Pilpres dan Pileg. Mari kita buat tonggak sejarah dengan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk negeri ini selama lima tahun kedepan," kata Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

CIBINONG (IM)- Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu meminta personel Dishub ikut mensukseskan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Permintaan ini diminta Pj Bupati Bogor saat melakan

kan apel siaga dengan Dinas Perhubungan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), Dinas Perhubungan yang total personelnya berjumlah 700 orang itu diminta harus melayani masyarakat secara adil.

"Pelayanan yang adil tidak harus sama, tetapi tidak boleh ada diskriminasi dalam melaksanakan Tupoksi," pinta Asmawa Tosepu kepada wartawan, Rabu (31/1).

Ia pun mengimbau agar personel Dishub memiliki loyal terhadap aturan, kebijakan, norma dan memiliki integritas.

"Kita harus memiliki dedikasi dan kompeten di bidangnya, itu buah atau dari hasil sikap integritas dan ujunnya kehormatan institusi terjaga," sambung Asmawa Tosepu.

Terkait Pilpres dan Pileg, ia kembali meminta semua personel Dishub memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pesta

demokrasi.

"Ini tanggung jawab kita bersama, untuk menjaga kondusifitas dalam ajang Pilpres dan Pileg, mulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat daerah," tuturnya.

Selain itu, ia lagi-lagi meminta seluruh jajaran Dishub dan juga Pemkab Bogor untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan menggunakan hak suaranya dalam ajang Pilpres dan Pileg.

"Peningkatan partisipasi pemilih adalah sukses yang kedua, ajak lingkungan terdekat kita untuk menggunakan hak suaranya. Mari kita buat tonggak sejarah dengan menghasilkan pemimpin-pemimpin

yang baik untuk negeri ini selama lima tahun kedepan," pinta Asmawa.

Ayah tiga orang anak itu pun mengajak agar masyarakat tidak 'golongan putih' (Golput) dan saya yakin kita sebagai orang yang sangat dewasa dalam politik sudah punya bayangan akan sosok pemimpin yang ia akan coblos.

"Saya yakin masing-masing kita sudah punya bayangan akan sosok pemimpin yang akan dicoblos, biarlah perbedaan pilihan atau pandangan itu menjadi rahasia kita dan tidak menjadi perdebatan hingga komunikasi antara kita jadi memutus silaturahmi," tukas Asmawa Tosepu. ● **gio**

Panwaslu Temukan Banyak Keterlibatan Anak-anak dalam Kampanye di Bogor

BOGOR (IM)- Keterlibatan anak-anak dalam penyelenggaraan Pemilu masih banyak ditemukan di Kota Bogor, Jawa Barat.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bogor Selatan mencatat, dalam beberapa agenda kampanye yang berlangsung di wilayah Rancamaya, Batu Tulis, dan Bondongan, keterlibatan anak-anak masih dijumpai di sana.

Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bogor Selatan, Endang Asyari mengungkapkan, temuan itu ia dapati setelah melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan kampanye di

lokasi-lokasi tersebut.

"Saya menemukan itu ketika turun ke lapangan. Ada di beberapa titik seperti di Rancamaya, Batu Tulis, dan Bondongan," kata Endang, Rabu (31/1).

Endang mengatakan, keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye merupakan suatu bentuk pelanggaran Pemilu. Ia mengaku, telah melaporkan hal itu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor.

"Sesuai arahan dari Bawaslu kita diminta untuk mencegah, mengawasi, dan menindak," sebutnya. Endang mengungkapkan, bentuk pelanggaran lainnya yang didapati di lapangan,

yaitu pembagian yang bukan termasuk bahan kampanye seperti sembako.

Endang menyebut, kondisi tersebut sering dijumpai ketika peserta pemilu berkampanye. "Ini juga termasuk pelanggaran juga, nominal juga tidak boleh lebih dari Rp 100.000," tuturnya.

Ia menyampaikan, langkah edukasi menjadi hal penting dalam upaya mengatasi pelanggaran tersebut. Bukan hanya warga, tapi juga terhadap para peserta pemilu. "Kita terus tekankan pemahaman untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi. Kita ingatkan terus, Alhamdulillah mereka mengerti," pungkasnya. ● **jai**



IDN/ANTARA

PEMANFAATAN SUNGAI UNTUK BUDI DAYA IKAN

Warga memberi pakan di keramba budi daya ikan di Sungai Citepus, Setra Sari, Bandung, Jabar, Rabu (31/1). Warga memanfaatkan aliran Sungai Citepus untuk digunakan lokasi budi daya ikan nila, emas, patin dan lele yang biasa dipanen selama enam bulan sekali untuk dijual ke warga sekitar dan ke lokasi pemancingan yang ada di Kota Bandung.

SELESAIKAN KONFLIK GKI YASMIN

Bima Arya Terima Penghargaan Kepemimpinan Toleransi Terbaik

BOGOR (IM)- Setara Institute memberikan penghargaan Kepemimpinan Toleransi Terbaik Tingkat Kota kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Penghargaan tersebut merupakan satu dari tiga penghargaan khusus yang diberikan Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran dari hasil studi yang dilakukan di 94 wilayah kota di Indonesia melalui riset selama satu tahun.

Bima menyampaikan, Setara Institute merupakan lembaga yang spesial bagi masyarakat di Kota Bogor karena pernah memberikan predikat Kota Bogor sebagai kota Intoleran di tahun 2015.

"Saat itu tidak ada yang tidak gundah dan galau dengan predikat itu, karena kami merasa DNA kota kami itu DNA yang cinta atas kebersamaan dalam keberagaman," kata Bima di Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/1).

"Tapi teman-teman Setara tentu ada data, ada argumentasi, kami sadar bahwa banyak yang harus kami benahi ketika itu," tambahnya.

Bima menyadari, menjadi wali kota tidak hanya mengolah kata dan menata kota tapi juga membangun manusia. Sebab itu, sambungannya, ia berikhtiar untuk menuntaskan masalah intoleran di kotanya.

Semua capaian tersebut, lanjut Bima, merupakan ikhtiar yang tidak

pernah berhenti selama 10 tahun untuk memastikan nilai-nilai kemanusiaan dan berberhikan kepada minoritas. "Kami terima kasih atas kolaborasi dan sinergi dengan semua. Karena banyak dukungan untuk menjadikan Kota Bogor menjadi kota yang lebih baik dan penghargaan ini kami persembahkan bagi warga Kota Bogor dan warga Indonesia," bebarnya.

Bima juga berharap kepada siapapun wali kotanya nanti, Indeks Toleransi di Kota Bogor harus terus menguat serta tidak boleh mundur.

"Tahun ini Indeks Toleransi Kota Bogor naik dari ke-17 ke-12 dan untuk ukuran kota besar naik dari peringkat ke-5 ke peringkat ke-3," imbuh dia.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan, Indeks Kota Toleran adalah satu kerja studi pengukuran terhadap kinerja kota-kota di Indonesia. Ismail menilai di bawah kepemimpinan Bima Arya, Kota Bogor terus bertransformasi menjadi kota toleran.

Salah satu indikator penilaian ialah penyelesaian masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. "Jadi ekosistem toleransi ini di antaranya ditopang oleh tiga hal. Pertama, kepemimpinan politik toleransi. Kedua, kepemimpinan sosial. Ketiga adalah kepemimpinan birokrasi," pungkasnya. ● **gio**